



**2017**

**LAPORAN PENUGASAN MENGHADIRI KEGIATAN  
REMBUK INTEGRITAS NASIONAL 2017  
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS NASIONAL  
YOGYAKARTA  
5 s.d 7 DESEMBER 2017**

INSPEKTORAT UTAMA  
SETJEN DAN BK DPR RI  
JAKARTA - 2017



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# Laporan Penugasan Menghadiri Kegiatan Rembuk Integritas Nasional 2017

*Integritas Tak Ternilai*

Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional –  
Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata



Yogyakarta, 5 s.d 7 Desember 2017

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penguatan pembangunan budaya integritas nasional, seluruh pilar penting bangsa terutama Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (KLOP) harus berperan aktif dalam membangun sistem integritas nasional. Harus kita sadari bersama bahwa pemberantasan korupsi dapat berhasil jika setiap pilar penting bangsa tersebut memiliki akuntabilitas yang kuat dan menjalin kolaborasi yang intensif dalam mewujudkan upaya pembangunan integritas nasional.

Hal tersebut di atas sejalan dengan inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang pertama yaitu Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan. Inisiatif strategis tersebut bertujuan mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai branding penguatan integritas secara nasional. Outcomes yang diharapkan dari inisiatif ini adalah terwujudnya birokrasi yang efisien, meningkatnya budaya integritas, terwujudnya inspirasi program budaya Kementerian Keuangan untuk instansi pemerintah lainnya, meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi, dan meningkatnya indeks persepsi publik atas kualitas pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *roadmap* Pembangunan Budaya Integritas Nasional sedang melaksanakan penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN) yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- Tahap 1; Pembangunan pondasi SIN

Pada tahap pertama, Pembangunan Pondasi SIN dituangkan sebagai sasaran strategis “Terwujudnya Pelembagaan SIN” dalam rangka memperkuat 3 pilar pembangunan integritas yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Diharapkan pada tahap ini dapat dihasilkan konsep, pedoman, serta *tools* yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya.

- Tahap 2; Aksi SIN

Pada tahap kedua, konsep dan pedoman serta *tools* yang telah disusun diharapkan menjadi rencana aksi nasional. Konsep SIN yang telah diformalisasi pada level nasional kemudian akan diimplementasikan secara masif di beberapa pilar SIN. KPK secara paralel melakukan penyempurnaan instrumen untuk dapat melakukan *assessment* dari hasil implementasinya.

- Tahap 3; Optimalisasi SIN.

Fase ketiga merupakan fase dimana SIN sudah diterapkan dan dijadikan barometer seluruh pilar dan elemen yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada fase ini juga diharapkan instrumen *assessment* SIN telah menjadi alat *monitoring* atas efektivitas SIN di masing-masing pilar.

Sebagai perwujudan pelaksanaan penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN), Rembuk Integritas Nasional ke-3 tahun 2017 berkomitmen untuk mulai mengimplementasikan seluruh konsep terkait Pembangunan Integritas Nasional yang dihasilkan pada RIN sebelumnya.

## B. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Kementerian Keuangan Nomor: UND-3/MK.9/2017 tanggal 10 November 2017
2. Surat Tugas Nomor IU/187/ST.N-PKPT/IRTAMA/SETJEN DPRRI/11/2017 tanggal 29 November 2017.

## C. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen para pimpinan KLOP dalam pembangunan budaya integritas, terutama dalam hal:

1. Akselerasi terhadap tindak lanjut hasil Rembuk Integritas Nasional Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2017.
2. Implementasi pembentukan:
  - a. Dewan atau Forum Integritas Nasional sebagai forum nasional Komite Integritas di setiap KLOP, dan
  - b. *Indonesia Corporate University* (I-Corpu) untuk mendukung implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional.
3. Strategi Pengendalian Integritas, melalui:
  - a. Penyelarasan *Key Performance Indicator* (KPI) yang paling strategis dan tugas/fungsi antar elemen penting bangsa untuk percepatan pembangunan nasional.
  - b. Peningkatan kesadaran akan *proxy war* dalam pengendalian strategis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pengawasan dan mitigasi risiko atas pengelolaan dana desa sebagai perwujudan dari nawa cita membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan desa.

## II. Hasil REMBUK INTEGRITAS NASIONAL (RIN) TAHUN 2017

Rembuk Integritas Nasional (RIN) Tahun 2017 kali ini bertemakan Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional - Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata. RIN Tahun 2017 ini dijadwalkan selama 3 hari yaitu Selasa s.d Kamis, 5 s.d 7 Desember 2017 dengan agenda sebagai berikut:

### 1. Hari Pertama Selasa, 5 Desember 2017

- Pembukaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI Ibu Sumiyati, Ak. M.F.M
- *Keynote Speech* #1 Wakil Menteri Keuangan RI Bapak Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.
- *Keynote Speech* #2 Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- *Keynote Speech* #3 Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta Bapak Sultan Hamengkubuwono X
- Diskusi Panel I : "Pengawasan dan Mitigasi Risiko Dana Desa"
- Diskusi Panel II : "Implementasi Pembentukan *Indonesia Corporate University* (I-Corpu)"

### 2. Hari Kedua Rabu, 6 Desember 2017

Sidang Komisi-komisi antara lain:

- a. Komisi A : Akselerasi tindak lanjut hasil Rembuk Integritas Nasional Tahun 2016 dan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II 2017 yang diwakili oleh Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M dari tim Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI.
- b. Komisi B : Implementasi *Indonesia Corporate University* dan Pembentukan Dewan atau Forum Integritas Nasional yang diwakili oleh Ibu Dr. Dewi Barliana S. M.Psi. QIA dari tim Sekretariat Jenderal dan BK DP RI.
- c. Komisi C : Strategi pengendalian integritas melalui penyesuaian KPI dan tugas/fungsi elemen bangsa yang diwakili oleh Dwi Nartami Setyorini, S.E dari tim Sekretariat Jenderal dan BK DP RI.
- d. Komisi D : Pembahasan Pengawasan dan Mitigasi Risiko Dana Desa

### 3. Visitasi ke Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta.

Pada hari kedua, Komisi-komisi yang telah dibentuk mengadakan sidang secara terpisah dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Hasil Sidang Komisi A

Strategi dan skenario pencapaian grade A dari 1000 KLOP pembangunan budaya integritas (PBI) pada tahun 2030 diupayakan melalui akselerasi *sharing* dan pendampingan antar antar KLOP yang terdefinisi menjadi 3 bagian, antara lain: tingkatan keterlibatan (*Level of Engagement*), tingkat (Grade) Pembangunan Budaya Integritas dan kualitas berbagi (*Level of Sharing*) pada level nasional. Semua KLOP yang sudah punya panduan pembangunan budaya integritas (PBI) mampu melakukan diklat mandiri dan melakukan tindak lanjut secara

berkesinambungan dengan KPK sebagai triger untuk menjamin program pembangunan budaya integritas. Strategi agar KLOP mempunyai panduan pembangunan budaya integritas yaitu dengan membuat peta dan mitigasi KKN, serta panduan Pembangunan Budaya Integritas yang dikolaborasikan secara efektif.

## 2. Hasil Sidang Komisi B

- Dewan Pembina adalah para pemimpin tertinggi KLOP, saat berakhir masa jabatannya maka berakhir pula keanggotaan di Dewan Pembina.
- Para pemimpin tertinggi KLOP yang berakhir masa jabatannya akan bergabung menjadi dewan pakar jika telah lulus atau memenuhi persyaratan sebagai *Integrity Change Leader*.
- Komisi B diharapkan dapat menyusun solusi dan rencana tindak lanjut untuk memastikan struktur dapat berjalan. *Quick win*-nya diantaranya adalah penyusunan AD/ART Dewan Integritas Nasional dan berbagai panduan untuk implementasinya.

Forum diskusi menunjuk Ibu Sumiyati (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan) sebagai Ketua Tim formatur Dewan Integritas Nasional.

Operasionalisasi Dewan Integritas Nasional dan *i-Corpu* sebagai satu kesatuan dan lembaga independen untuk memastikan terintegrasinya pembangunan budaya integritas nasional dengan dukungan *Nasional Risk Management* dan *Nasional Human Capital*.

## 3. Hasil Komisi C

Strategi pengendalian integritas melalui penyalarsan KPI dan tugas/fungsi elemen bangsa, melalui pencapaian 3 hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Strategi pertaubatan/pengakuan dosa menuju pimpinan/tokoh berintegritas::
  - Pemberantasan korupsi melalui pengampunan dosa/pertaubatan dengan pengembalian harta hasil korupsi ke kas Negara dan dibebaskan dari tuntutan hukum bagi pelaku dengan menetapkan batas waktu akhir pengampunan dosa/pertaubatan.
  - Membuat kajian, draft RUU disosialisasikan/kaji public, referendum dan finalisasi peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terkait dengan poin 1 yang mengikat bagi aparat pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.
- b. Mitigasi Risiko Pembangunan budaya integritas nasional pada tataran individu, organisasi dan kepemimpinan melalui:
  - 1) Penyusunan kode etik dan pedoman perilaku serta implementasi pengembangan tunas integritas.

- 2) Pemastian rekrutmen pemimpin dan tokoh berintegritas melalui instrument pengakuan penyimpangan masa lalu.
  - 3) Pengefektifan regulasi nasional terkait inovasi yang mengakomodir kekhususan keunggulan daerah/KLOP (visium), kode etik dan perilaku KLOP, pengakuan *Core Competency* dan pola struktur matrik.
- c. Pemetaan *Key Performance Indicator* (KPI) Utama untuk *strategic action* dan *combined assurance*, yang menghasilkan beberapa rekomendasi di antaranya:
- 1) Sektor Pemerintah Daerah:
    - Kolaborasi dengan K/L terkait dalam penyusunan regulasi dalam inovasi
    - Perlunya *guidelines* (panduan) dalam implementasi Kode Etik untuk meminimalisi kemungkinan multitafsir
    - Pembentukan *talent pool (talent management)* nasional untuk Kepala Daerah
    - Penyusunan regulasi terkait fleksibilitas struktur organisasi Pemda
  - 2) BUMN/BUMD
    - Kolaborasi antara BUMN/BUMD dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka menyelaraskan program-program BUMN/BUMD (misalnya, Penugasan, CSR) dengan program kerja Pemda
    - Perlunya *guidelines* (panduan) dalam implementasi Kode Etik untuk meminimalisi kemungkinan multitafsir
    - Pemanfaatan *talent pool (talent management)* nasional untuk posisi Direksi
    - Kolaborasi dalam pemanfaatan I-CorpU
    - BUMN/BUMD harus menjadi *partner* Pemerintah dalam pembangunan
  - 3) Kementerian/Lembaga
    - Kolaborasi dengan K/L terkait untuk merumuskan kebijakan terkait inovasi K/L
    - Perlunya *guidelines* (panduan) dalam implementasi Kode Etik untuk meminimalisasi kemungkinan multitafsir
    - Peningkatan kompetensi melalui pembentukan *talent pool (talent management)* ASN nasional

- Perlunya pemanfaatan aplikasi untuk menganalisa struktur organisasi yang tumpang tindih (*Enterprise Architecture*)

#### 4) Perguruan Tinggi

- Kolaborasi antara perguruan Tinggi (sebagai lembaga riset) dengan BUMN/BUMD sebagai eksekutor
  - Perlunya review terkait aturan pembelajaran bagi dosen (pengajar) missal: *visiting scholar*
  - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen, maka diharapkan investasi pendidikan dosen dapat menjadi pengurang dari surplus operasional PT Badan Hukum yang menjadi objek pajak badan. Oleh karenanya diperlukan review kebijakan terkait hal tersebut.
4. Berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan tata kelola dana desa, penguatan kapasitas, kapabilitas dan integritas perangkat dan pendamping desa serta meningkatkan sinergi pengawasan dana desa.

### III. KESIMPULAN

Pembangunan Budaya Integritas bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan secara instan, membutuhkan proses dan waktu panjang dan keterlibatan semua elemen bangsa, serta banyak dinamikanya. Pembangunan budaya integritas akan berhasil kalau dimulai dan didukung serta adanya partisipasi langsung dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (KLOP), seperti layaknya menegakkan ikat pinggang yang hanya bisa ditegakkan bila dari atas lalu kebawah.

Berbagai sistem dan program perubahan selalu mensyaratkan keterlibatan pimpinan atau sering disebut dengan *tone of the top*. Sejak 5 tahun yang lalu KPK bersama KLOP tak pernah lelah menggerakkan orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi pribadi yang utuh berintegritas. Para tunas integritas telah bergulir dan diharapkan tumbuh banyak dan subur di setiap bidang bergerak mempengaruhi sekelilingnya, semakin lama semakin banyak dan ingin membangun bangsa yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan hasil dari RIN 2017 ini akan terus ditindaklanjuti dan berkelanjutan demi mewujudkan Tunas-tunas Integritas yang sesungguhnya.

Demikian laporan penugasan menghadiri Kegiatan Rembuk Integritas Nasional (RIN) Tahun 2017 di Provinsi D.I Yogyakarta.

Jakarta, 18 Desember 2017

Inspektur Utama,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M 

NIP. 19620719 198803 1 001

Dokumentasi Rembuk Integrasi Nasional 2017, Yogyakarta 5 Desember 2017



